

DAMPAK KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN PERCERAIAN DI INDONESIA: ANALISIS DATA DAN IMPLIKASINYA

Muhammad Jaidi

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: mhmmjdjaidi@gmail.com

Abstract: This study examines the impact of corruption on poverty and divorce in Indonesia, which is a crucial and urgent social phenomenon to address. It hypothesizes that corruption significantly contributes to rising poverty levels and divorce rates. Utilizing a secondary data analysis approach, the research draws on information from credible online news sources and official data from institutions such as the Central Statistics Agency. The findings reveal a strong correlation between corruption and increased poverty, which subsequently influences higher divorce rates, particularly affecting women and children. These results underscore that corruption not only undermines economic stability but also directly threatens social welfare. Therefore, the study highlights the importance of informed and effective policy-making aimed at combating corruption, reducing poverty, and safeguarding vulnerable families.

Keywords: Corruption, Poverty, Divorce, Social Impact, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini mengangkat isu penting mengenai dampak korupsi terhadap kemiskinan dan perceraian di Indonesia, yang merupakan fenomena sosial yang krusial dan mendesak untuk ditangani. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa korupsi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan dan angka perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder, dengan mengumpulkan informasi dari berita online yang terpercaya dan website resmi seperti Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tingkat korupsi dan peningkatan kemiskinan, yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya angka perceraian, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Temuan ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini penting untuk menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan, serta perlindungan terhadap keluarga yang terdampak.

Kata Kunci: Korupsi, Kemiskinan, Perceraian, Dampak Sosial, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Isu korupsi dan kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena sosial yang krusial dan mendesak untuk ditangani. Korupsi yang merajalela tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan dan perceraian. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang mencerminkan tingginya tingkat korupsi di berbagai sektor. Selain itu, angka perceraian yang meningkat menunjukkan dampak negatif dari kondisi ekonomi yang tidak stabil, di mana perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi isu ini secara akademik dan praktis, agar dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara korupsi, kemiskinan, dan perceraian, namun masih terdapat kekurangan yang signifikan. Banyak studi yang fokus pada satu aspek saja, seperti dampak korupsi terhadap ekonomi, tanpa mempertimbangkan interaksi antara korupsi, kemiskinan, dan dampaknya terhadap struktur keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korupsi berkontribusi pada kemiskinan, tetapi tidak banyak yang mengeksplorasi bagaimana kemiskinan dapat memicu perceraian dan sebaliknya. Hal ini menciptakan celah dalam pemahaman kita tentang dinamika sosial yang kompleks ini. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekurangan tersebut dengan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merespons kekurangan dalam penelitian yang ada dengan cara yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan timbal balik antara korupsi, kemiskinan, dan perceraian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, tulisan ini akan membahas bagaimana korupsi mempengaruhi pengeluaran publik yang pro-miskin dan bagaimana hal ini berkontribusi pada peningkatan angka perceraian. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami isu-isu sosial yang saling terkait di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu yang diteliti. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, sehingga dapat menganalisis data secara lebih efisien dan efektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berita online yang terpercaya serta website resmi seperti Badan

Pusat Statistik. Sumber-sumber ini menyediakan informasi yang valid dan terkini mengenai tingkat korupsi, kemiskinan, dan perceraian di Indonesia. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara ketiga isu tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan mengenai dampak korupsi terhadap kemiskinan dan perceraian di Indonesia.

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa korupsi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan dan angka perceraian di Indonesia. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa korupsi mengurangi pengeluaran publik yang seharusnya mendukung program pro-miskin, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Data menunjukkan bahwa peningkatan korupsi berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan dan perceraian, di mana perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban utama. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara korupsi, kemiskinan, dan perceraian, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mengatasi masalah ini.

B. PEMBAHASAN

Korupsi dan kemiskinan saling terkait erat, dengan kausalitas dua arah di antara keduanya.¹ Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menghambat investasi, meredam kewirausahaan, dan mendistorsi pengeluaran publik.² Ini memperburuk ketimpangan pendapatan dan secara tidak proporsional mempengaruhi orang miskin dengan mengurangi pengeluaran publik pro-miskin dan menciptakan kekurangan buatan dalam layanan publik.³ Kemiskinan, pada gilirannya, dapat melahirkan korupsi karena ketidaksetaraan sosial dan insentif ekonomi yang menyimpang.⁴ Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, tata kelola yang tidak efektif, dan karakteristik geografis juga berkontribusi terhadap kemiskinan.⁵ Mengatasi korupsi membutuhkan

¹ Vahideh Negin, Zakariah Abd Rashid, dan Hesam Nikopour, "The Causal Relationship between Corruption and Poverty: A Panel Data Analysis," MPRA Paper, 25 Juni 2010, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24871/>.

² Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector, "Corruption and poverty: A review of recent literature," *Management Systems International* 600 (2003): 5-16.

³ Sanjeev Gupta, "Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?," *IMF Working Papers* 1998, no. 076 (Mei 1998): 1, <https://doi.org/10.5089/9781451849844.001>.

⁴ Chetwynd, Chetwynd, dan Spector, "Corruption and poverty."

⁵ A. H. Ng dkk., "Poverty: Its causes and solutions," *International Journal of Humanities and Social Sciences* 7, no. 8 (2013): 2471-79.

reformasi struktural di bidang-bidang seperti pemungutan pajak, regulasi bisnis, dan pembangunan infrastruktur.⁶ Strategi pemberantasan korupsi antara lain meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik, menetapkan insentif untuk perilaku jujur di kalangan pegawai negeri, dan mempromosikan media yang bebas.⁷ Upaya pengentasan kemiskinan harus fokus pada penciptaan kerangka kerja untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan orang miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka.⁸

Kelimpahan sumber daya alam di Indonesia telah dikaitkan dengan peningkatan kemiskinan dan korupsi, bukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.⁹ Fenomena yang dikenal sebagai "kutukan sumber daya" ini dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya yang buruk dan kegagalan kelembagaan.¹⁰ Korupsi memiliki efek positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan peningkatan korupsi sebesar 1% yang menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 1,36%.¹¹ Hubungan kausal antara korupsi dan kemiskinan bersifat searah, dengan korupsi menyebabkan kemiskinan tetapi tidak sebaliknya.¹² Daerah kaya sumber daya alam sering mengalami pengembangan

⁶ Susan Rose-Ackerman, "Corruption and Development," dalam *International Development Governance*, ed. oleh Ahmed Shafiqul Huque dan Habib Zafarullah, 1 ed. (Routledge, 2017), 289-303, <https://doi.org/10.4324/9781315092577-16>.

⁷ Leonce Ndikumana, "Corruption and Pro-Poor Growth Outcomes: Evidence and Lessons for African Countries," Working paper, Working Papers (Political Economy Research Institute, University of Massachusetts at Amherst, 2006), <https://EconPapers.repec.org/RePEc:uma:periwp:wp120>.

⁸ Ng et.al., "Poverty."

⁹ Raldin Alif Al Hazmi, "The Moderating Role Of Economic Growth In The Association Between Corruption And Poverty In Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 1 (19 Februari 2024): 76-86, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.725>.

¹⁰ Dewi Rahayu, "Natural Resources, Human Capital and Economic Growth: Evidence from Indonesia," dalam *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia* (Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia, Magelang, Indonesia: EAL, 2021), <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311792>.

¹¹ Azwar Azwar Azwar dan Rahmaluddin Saragih, "Does Corruption Affect Poverty in Indonesia?," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 11, no. 1 (20 Agustus 2018): 1-14, <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.175>.

¹² Ina Purwantini Rahayu dan Tri Widodo, "The Causal Relationship Between Corruption and Poverty in Asean: A General Method of Moments/Dynamic Panel Data Analysis," *Journal of*

sumber daya manusia yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.¹³ Selain itu, kekurangan dan keluhan relatif di provinsi kaya sumber daya berkontribusi pada gerakan separatis dan konflik antar-komunitas.¹⁴

Umar bin Abdul Aziz, khalifah Umayyah kedelapan, menerapkan kebijakan yang efektif untuk memberantas korupsi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi selama 2,5 tahun pemerintahannya yang singkat.¹⁵ Dia memecat pejabat korup, termasuk anggota keluarga, dan mengembalikan kekayaan yang diperoleh secara ilegal ke kas negara.¹⁶ Kebijakan ekonomi Umar berfokus pada optimalisasi penerimaan negara melalui zakat, jizya, kharaj, dan sumber lainnya dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Dia menghapuskan praktik diskriminatif, mereformasi pertanian, dan menghilangkan pajak yang memberatkan.¹⁸ Kepemimpinan Umar ditandai dengan keadilan, kesederhanaan, dan transparansi, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.¹⁹ Kebijakannya menyebabkan peningkatan daya beli, pengurangan kemiskinan, dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan,

Economics, Business, and Accountancy | *Ventura* 15, no. 3 (1 Desember 2013): 527, <https://doi.org/10.14414/jebav.v15i3.119>.

¹³ Rahayu, "Natural Resources, Human Capital and Economic Growth."

¹⁴ Mohammad Zulfan Tadjoeeddin, "A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development," 2007, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c05ed915d3cfd001100/wp35.pdf>.

¹⁵ Anisa Wihayati, "Peran Kepribadian dalam Kesuksesan Pembangunan: Studi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz," *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 1 (16 Juli 2024): 67-86, <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v6i1.306>.

¹⁶ Muhammad Nasihudin Ali, "Kebijakan Umar Ibn Abdul Aziz Dalam Pemberantasan Korupsi," *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1, no. 2 (21 Oktober 2020): 37-45, <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i2.305>.

¹⁷ Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan Siti Hayati, "The Impact of Caliph Umar Ibn Abdul Aziz's Economic Policy on the Welfare of the Daula Umayyah Community," *Millah* 19, no. 1 (Agustus 2019): 99-116, <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art5>.

¹⁸ Zetrina Alya dan Sebastian Herman, "How Omar bin Abdul Aziz Reached Economic Golden Era: Unearthing the Umayyad History From Economics Perspective," *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (11 September 2023), <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.5712>.

¹⁹ Annisa Silvi Kusumastuti dan Mohammad Ghozali, "Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdil Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah," *ASAS* 12, no. 01 (27 Juli 2020): 1-18, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6920>.

membuatnya mendapatkan gelar Khalifah yang Dibimbing dengan Benar kelima.²⁰

Kebijakan ekonomi dan pengelolaan zakat Umar bin Abdul Aziz, menyoroti dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Di bawah kepemimpinannya, kemiskinan hampir diberantas, dengan kelebihan dana zakat digunakan untuk melunasi hutang dan memberikan bantuan pernikahan.²¹ Kebijakan Umar meliputi pemerataan kekayaan, optimalisasi penerimaan negara melalui zakat, jizyah, kharaj, dan sumber lainnya, serta mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam pengeluaran.²² Reformasinya dalam pengelolaan zakat menyulitkan menemukan penerima yang memenuhi syarat karena kemakmuran yang meluas.²³ Keberhasilan kebijakan ini dikaitkan dengan manajemen Baitul Mal yang efektif, tanggung jawab kepemimpinan, dan kesadaran publik.²⁴ Beberapa sarjana menyarankan bahwa Indonesia dapat memperoleh manfaat dari mengadopsi pendekatan pengelolaan zakat terpusat serupa untuk mengatasi kemiskinan secara lebih efektif.²⁵

1. Kemiskinan Penyebab Perceraian di Indonesia

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut perceraian dapat menyebabkan munculnya masalah perekonomian yang baru. Nasaruddin mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan semakin bertambah seiring dengan tingginya angka perceraian. "Perceraian sering kali melahirkan orang miskin baru. Korban pertamanya adalah istri, lalu anak," ujar Nasaruddin dalam keterangan resmi, Rabu (23/4/2025). Imam Besar Masjid Istiqlal ini menyampaikan, salah satu solusi untuk menekan kasus perceraian yakni adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasaruddin ingin pemerintah menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan

²⁰ Muhammad Zia Ulhaq, "Pengelolaan Keuangan Republik Islam (Umar Bin Abdul Aziz)," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (21 Juni 2020), <https://doi.org/10.33477/eksy.v2i01.1330>.

²¹ Siti Hayati, "Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, 99-116, <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art5>.

²² Nurani Puspa Ningrum dan Yuliawati, "Terobosan Dan Perubahan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 8, no. 1 (3 April 2020): 1-27.

²³ Yusuf Al Manaanu dkk., "Analisis Historis Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan Zakat," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (13 Oktober 2023): 212-21, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i2.975>.

²⁴ Kuliman Harahap, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz," *Jurnal Ipteks Terapan* 8, no. 2 (14 Oktober 2016): 58-69, <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i2.424>.

²⁵ Annisa Silvi Kusumastuti dan Ardhian Ahmad Syakuro, "Peran Kebijakan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *ZISWAF ASFA JOURNAL* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 106-16, <https://doi.org/10.69948/ziswaf.1>.

untuk menjaga keberlangsungan pernikahan. "Sudah saatnya UU Perkawinan menegaskan pentingnya pelestarian perkawinan, sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa," ujarnya. Menurutnya, negara perlu hadir bukan hanya dalam mengesahkan perkawinan, tetapi juga menjaga keutuhan pernikahan. "Jika perlu, kita usulkan Undang-Undang baru tentang ketahanan rumah tangga. Negara tidak cukup hanya mengatur legalitas pernikahan, tetapi juga perlu hadir dalam menjaga keutuhannya," tuturnya.²⁶

Kisah pilu seorang wanita yang terpaksa menjual perhiasan emas miliknya demi melunasi pinjaman pribadi yang dibuat atas permintaan suami viral di media sosial. Pinjaman tersebut diambil menggunakan nama sang istri, namun sang suami tidak mau bertanggung jawab untuk membayar kembali, sehingga membuat wanita tersebut terancam masuk daftar hitam perbankan. Dikutip dari Mstar.com Senin (2/6/2025), dalam unggahan yang dibagikan melalui media sosial, wanita tersebut mengungkapkan bahwa ia terpaksa menjual emas yang telah lama disimpannya di Ar Rahnū (lembaga pegadaian syariah) demi menyelesaikan kewajiban keuangan yang bukan ia ciptakan. "Selamat tinggal hasil penat lelah. Saya terpaksa jual sebab malas nak kira tentang tukar surat atau tebus barang kemas. Dah lama sangat duduk dalam Ar Rahnū," tulisnya dalam unggahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pinjaman yang ia ambil sebenarnya bukan untuk kebutuhan pribadi, melainkan untuk membantu suaminya saat itu. Namun setelah pinjaman cair, sang suami enggan membantu membayarnya, bahkan hingga mereka resmi bercerai setahun kemudian. "Walau bukan saya penyebab atau pemilik hutang-hutang ini semua, saya reda (ikhlas) sebab saya yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik," ujarnya. Wanita itu juga memberikan pesan kepada para perempuan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Ia menekankan pentingnya memilih suami yang memiliki kondisi keuangan yang stabil dan memiliki tanggung jawab agama yang baik, agar tidak terjebak dalam situasi serupa. Kisah tersebut pun mengundang banyak simpati dari warganet. Banyak dari mereka yang membagikan pengalaman serupa, di mana mereka harus menanggung beban hutang akibat tindakan suami yang tidak bertanggung jawab. "Betul sis, dulu saya bodoh, buat personal loan untuk suami dan gadai barang kemas. Tapi makin kita tolong, makin dia menyusahkan kita, dan Alhamdulillah akhirnya saya dicerai," tulis seorang warganet di kolom komentar. Ada pula yang menyangkan kenyataan bahwa banyak istri saat ini yang menjadi penanggung beban ekonomi rumah tangga, sementara suami bersikap acuh. "Kebanyakan sekarang ini, istri yang tanggung suami sampai terpaksa bergolok gadai, tapi duit tak tahu habis ke mana," tulis komentar

²⁶ "Menag: Perceraian Lahirkan Orang Miskin Baru," diakses 6 Juni 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/23/12490721/menag-perceraian-lahirkan-orang-miskin-baru>.

lainnya. Meski begitu, beberapa warganet juga membagikan pengalaman positif, menegaskan bahwa masih ada laki-laki bertanggung jawab. “Tak berduit tapi faham tanggung jawab tak apa, suami saya tak kaya tapi setiap kali dapat bonus, dia akan belikan emas untuk saya,” ujar seorang pengguna. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keuangan dalam rumah tangga seharusnya dikelola bersama dengan kejujuran dan tanggung jawab. Pinjaman atas nama pasangan tanpa kesepakatan atau jaminan hanya akan menyisakan luka jika hubungan berakhir tanpa penyelesaian.²⁷

Kemiskinan di Indonesia sering kali dipicu oleh perceraian, yang dapat menciptakan masalah ekonomi baru, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa perceraian berpotensi menambah jumlah penduduk miskin, dengan istri dan anak sebagai korban utama. Sebagai bukti, sebuah kisah viral menunjukkan seorang wanita yang terpaksa menjual perhiasan emasnya untuk melunasi pinjaman yang diambil atas nama dirinya, namun tidak dibayar oleh suaminya. Wanita tersebut mengingatkan pentingnya memilih pasangan yang bertanggung jawab secara finansial. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga harus dilakukan dengan transparansi dan tanggung jawab, agar tidak menimbulkan beban berat di kemudian hari, terutama jika hubungan berakhir.

Temuan menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia cenderung meningkatkan angka kemiskinan, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab keuangan setelah perceraian, di mana seringkali istri harus menanggung beban hutang yang diambil atas nama mereka. Sebagai contoh, seorang wanita viral yang menjual perhiasan emasnya untuk melunasi pinjaman yang dibuat oleh suaminya, yang tidak mau bertanggung jawab setelah perceraian. Kisah ini mencerminkan pola di mana banyak perempuan terjebak dalam situasi serupa, di mana mereka harus menanggung beban ekonomi akibat tindakan suami yang tidak bertanggung jawab. Kesimpulannya, penting untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab finansial dalam pernikahan dan perlunya perlindungan hukum untuk mencegah perempuan menjadi korban dalam situasi perceraian.

2. Korupsi Penyebab Kemiskinan di Indonesia

‘Klasemen Liga Korupsi’ Indonesia menjadi bahan perbincangan masyarakat Februari lalu. Tak ada yang menyangka korupsi PT Timah tersalip dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina. Diskusi satire

²⁷ Istiqomah Kaloko, “Suami Tak Mau Bayar Pinjaman hingga Akhirnya Cerai, Wanita Ini Harus Jual Perhiasan untuk Melunasi,” 1748960683, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/suami-tak-mau-bayar-pinjaman-hingga-akhirnya-ceraiwanita-ini-harus-jual-perhiasan-untuk-melunasi/ar-AA1G0CD0?ocid=BingNewsVerp>.

masyarakat menjadi gambaran kondisi Indonesia dengan berbagai kasus korupsinya. Kasus korupsi tak hanya berbicara pada kerugian negara, tapi juga kerugian lingkungan dan dampak kepada masyarakat. Skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 37 dan menempatkan Indonesia pada posisi 99 dari 180 negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 2.730 kasus korupsi pada waktu 2020 – 2024. Bahkan total kerugian negara pada 2024 mencapai Rp 310,61 trilliun. Sedangkan untuk 12 anggota “Klasemen Liga Korupsi”, total kerugian negara mencapai Rp 1.672 Trilliun. Bahkan ada tiga dari 12 kasus dalam klasemen tersebut merupakan kasus korupsi sumber daya alam.²⁸

Mahfud MD mengatakan anak muda memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia atau SDM dan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Berdasarkan analisis, kata Mahfud, ketika SDA dikelola tanpa korupsi masyarakat Indonesia akan mendapatkan keuntungan. Analisis ini menurut Mahfud pernah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. “Kalau sumber daya alam dikelola dengan baik tanpa korupsi orang Indonesia itu akan mendapatkan uang minimal Rp 20 juta setiap bulan secara cuma-cuma,” kata Mahfud dalam Dialog Interaktif Cawapres “Mencuri Hati” Kawula Muda yang digelar TvOne di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023.²⁹

Korupsi di Indonesia menjadi masalah serius yang berdampak pada kemiskinan dan kerugian negara. Menurut Mahfud MD, jika sumber daya alam (SDA) dikelola tanpa korupsi, masyarakat Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan, bahkan hingga Rp 20 juta per bulan. Bukti dari pernyataan ini terlihat dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat 2.730 kasus korupsi antara 2020 hingga 2024, dengan total kerugian negara mencapai Rp 310,61 triliun. Selain itu, Indonesia menempati posisi 99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, dengan skor hanya 37. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang transparan dan bebas korupsi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Temuan mengenai korupsi di Indonesia menunjukkan pola yang mengkhawatirkan terkait dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

²⁸ Lusia Arumingtyas, “Klasemen Liga Korupsi Isu Lingkungan, Siapa Juaranya?,” *Mongabay.co.id* (blog), 28 Mei 2025, <https://mongabay.co.id/2025/05/28/klasemen-liga-korupsi-isu-lingkungan-siapa-juaranya/>.

²⁹ “Mahfud Md Bilang Kalau SDA Tidak Dikorupsi, Orang Indonesia Akan Dapat Rp20 Juta Tiap Bulan | tempo.co,” Tempo, Desember | 21.18 WIB 2023, <https://www.tempo.co/politik/mahfud-md-bilang-kalau-sda-tidak-dikorupsi-orang-indonesia-akan-dapat-rp20-juta-tiap-bulan-111757>.

Korupsi yang merajalela, seperti yang tercermin dalam 2.730 kasus yang tercatat oleh KPK antara 2020 hingga 2024, menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 310,61 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat potensi ekonomi masyarakat. Mahfud MD menekankan bahwa jika sumber daya alam dikelola dengan baik dan bebas dari korupsi, masyarakat bisa mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan, hingga Rp 20 juta per bulan. Dengan skor Indeks Persepsi Korupsi yang rendah, yaitu 37, dan posisi Indonesia di urutan 99 dari 180 negara, jelas bahwa korupsi menjadi penghalang utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesimpulannya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel terhadap sumber daya alam sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

3. Angka Perceraian Disebabkan Kemiskinan di Indonesia

Data Statistik Angka Perceraian Tahun 2024

Provinsi	Judi	Meninggalkan Salah satu Pihak	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus	Ekonomi
Aceh	26	551	122	5.035	218
Sumatera Utara	58	830	117	14.454	299
Sumatera Barat	30	936	100	6.922	224
Riau	36	745	125	6.922	231
Jambi	46	375	77	3.746	230
Sumatera Selatan	120	769	427	7.851	778
Bengkulu	26	263	85	2.991	130
Lampung	131	655	259	11.195	2.168
Kepulauan Bangka Belitung	65	163	123	1.601	268
Kepulauan Riau	22	311	93	2.749	148
DKI Jakarta	119	1.505	272	8.374	1.881
Jawa Barat	472	2.781	653	51.122	33.264
Jawa Tengah	281	7.019	336	34.812	21.832
DI Yogyakarta	17	453	93	3.431	637
Jawa Timur	819	5.381	1.985	36.275	32.852
Banten	166	442	290	9.974	2.535
Bali	3	85	65	848	23
Nusa Tenggara Barat	44	1.302	272	4.980	207

Provinsi	Judi	Meninggalkan Salah satu Pihak	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	Ekonomi
Nusa Tenggara Timur	1	135	35	309	4
Kalimantan Barat	99	893	247	2.922	413
Kalimantan Tengah	27	310	45	2.494	153
Kalimantan Selatan	22	302	53	5.676	312
Kalimantan Timur	67	872	223	4.374	487
Kalimantan Utara	1	110	11	803	1
Sulawesi Utara	6	287	48	1.469	63
Sulawesi Tengah	28	370	197	3.092	97
Sulawesi Selatan	89	1.584	390	9.297	434
Sulawesi Tenggara	21	528	206	2.569	69
Gorontalo	3	392	88	1.514	27
Sulawesi Barat	9	398	55	780	45
Maluku	4	76	27	526	19
Maluku Utara	10	220	43	918	57
Papua Barat	6	80	30	276	63
Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
Papua	15	142	51	824	29
Papua Selatan	0	0	0	0	0
Papua Tengah	0	0	0	0	0
Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
Jumlah	2.889	31.265	7.243	251.125	100.198
Ranking	5	3	4	1	2

Sumber: BPS Tahun 2024, terakhir diperbaharui 14 Februari 2025³⁰

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia, menempati posisi kedua dalam ranking penyebab perceraian pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu ketegangan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Berdasarkan data, total kasus perceraian yang

³⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik," diakses 6 Juni 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

disebabkan oleh faktor ekonomi mencapai 100.198, menjadikannya sebagai salah satu faktor dominan setelah kekerasan dalam rumah tangga yang menduduki peringkat pertama dengan 251.125 kasus. Provinsi dengan angka perceraian tertinggi akibat masalah ekonomi adalah Jawa Barat, dengan 33.264 kasus. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, guna mengurangi angka perceraian dan menciptakan keluarga yang lebih harmonis.

Temuan data mengenai penyebab perceraian di Indonesia menunjukkan pola yang jelas terkait dengan faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa masalah finansial dan kekerasan menjadi pemicu utama ketidakstabilan dalam hubungan suami istri, yang berujung pada perceraian. Dari data yang diperoleh, kekerasan dalam rumah tangga menduduki peringkat pertama dengan 251.125 kasus, diikuti oleh masalah ekonomi yang mencapai 100.198 kasus. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur mencatat angka perceraian tertinggi, yang menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki angka perceraian yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka perceraian, perlu adanya intervensi yang fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi keluarga.

4. Hipotesis

Korupsi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengurangan pengeluaran publik yang pro-miskin dan distorsi dalam pengelolaan sumber daya. Menurut literatur, peningkatan korupsi sebesar 1% dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 1,36%. Selain itu, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi investasi dan kewirausahaan, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia, karena hubungan kausal antara korupsi dan kemiskinan bersifat searah, di mana korupsi menyebabkan kemiskinan, tetapi tidak sebaliknya.

Tingginya angka perceraian di Indonesia berkontribusi pada peningkatan jumlah penduduk miskin, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Perceraian sering kali menciptakan masalah ekonomi baru, di mana istri dan anak menjadi korban utama. Data menunjukkan bahwa total kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi mencapai 100.198, menjadikannya sebagai penyebab dominan kedua setelah kekerasan dalam

rumah tangga. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menekankan bahwa perceraian dapat melahirkan orang miskin baru. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian pernikahan dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan agar tidak menjadi korban dalam situasi perceraian, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan bebas dari korupsi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika sumber daya alam dikelola dengan baik, masyarakat berpotensi mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan. Mahfud MD menyatakan bahwa jika sumber daya alam dikelola tanpa korupsi, masyarakat Indonesia dapat memperoleh keuntungan hingga Rp 20 juta per bulan. Data KPK menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 310,61 triliun antara 2020 hingga 2024. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dan akuntabel terhadap sumber daya alam sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, serta menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sejahtera.

C. HASIL

Artikel ini mengulas hubungan kompleks antara korupsi, kemiskinan, dan perceraian di Indonesia. Korupsi menyebabkan kemiskinan melalui distorsi pengelolaan sumber daya, sementara kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat memicu perceraian, yang kemudian memperparah kemiskinan, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Data KPK mencatat ribuan kasus korupsi dengan kerugian triliunan rupiah, dan statistik perceraian 2024 menunjukkan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan kedua. Kisah nyata seorang wanita yang harus menjual perhiasan untuk menyelesaikan hutang suami memperkuat fakta ini. Hubungan timbal balik ini menunjukkan perlunya pendekatan terpadu dalam pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi secara langsung memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan. Korupsi mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial dan investasi publik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Literatur menunjukkan bahwa peningkatan korupsi sebesar 1% dapat menaikkan kemiskinan sebesar 1,36%. Kebijakan pemimpin sebagaimana Umar bin Abdul Aziz yang efektif dalam memberantas korupsi mampu menunjang kesejahteraan. Korupsi bukan hanya isu hukum, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial yang harus diatasi agar pembangunan dan kesejahteraan merata dapat tercapai.

Fenomena kemiskinan yang diperparah oleh korupsi dibandingkan dengan dampak perceraian terhadap kondisi ekonomi keluarga di Indonesia. Keduanya saling berkaitan, namun korupsi berdampak luas secara nasional sementara perceraian lebih berfokus pada kerentanan finansial keluarga, terutama perempuan dan anak. Korupsi menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah, sementara data perceraian menunjukkan ekonomi sebagai penyebab signifikan. Kisah seorang istri harus menanggung hutang atas nama suami mengilustrasikan beban ekonomi perceraian. Meski berbeda skala, keduanya memperburuk kemiskinan, menuntut strategi pemberantasan korupsi sekaligus perlindungan sosial bagi keluarga yang terdampak perceraian.

Hubungan korupsi, kemiskinan, dan perceraian menandai persoalan sosial-ekonomi yang saling mendukung satu sama lain dalam konteks Indonesia. Korupsi menurunkan kualitas layanan dan peluang ekonomi, memicu kemiskinan yang pada gilirannya dapat menyebabkan konflik keluarga dan perceraian. Perceraian memperburuk kondisi ekonomi, terutama perempuan yang sering menanggung hutang. Studi menunjukkan adanya pola korelasi dan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan, serta data perceraian yang berhubungan erat dengan kondisi ekonomi. Pola ini mengindikasikan perlunya pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemberantasan korupsi, program pengentasan kemiskinan, dan dukungan sosial bagi keluarga.

Fenomena ini mengajak kita merenungkan pentingnya tata kelola yang baik dan kepedulian terhadap dimensi sosial keluarga dalam pembangunan. Meskipun fokus sering kali pada aspek ekonomi makro, perhatian pada dampak sosial seperti perceraian akibat kemiskinan harus diperkuat untuk menghindari siklus kemiskinan yang berulang. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang sukses menurunkan kemiskinan lewat pengelolaan zakat dan pengentasan korupsi menunjukkan manfaat pendekatan terpadu, sementara kisah nyata korban perceraian menegaskan perlunya perlindungan hukum dan ekonomi keluarga. Refleksi ini seharusnya mendorong pembuat kebijakan untuk mengadopsi strategi lintas sektor demi kesejahteraan berkelanjutan.

Hasil review dan temuan riset ini mengimplikasikan kebijakan yang menyelaraskan pemberantasan korupsi, penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan perlindungan sosial keluarga. Integrasi antar program akan mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka perceraian yang dipicu masalah ekonomi. Selain itu, tata kelola sumber daya alam yang transparan memaksimalkan potensi pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat. Data KPK dan statistik BPS mendukung perlunya reformasi struktural, sedangkan pengalaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menginspirasi model pengelolaan keuangan negara yang berkeadilan. Implementasi kebijakan yang komprehensif dan inklusif menjadi kunci utama untuk

menciptakan Indonesia yang bebas korupsi, sejahtera, dan keluarga yang harmonis.

D. PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan hubungan erat antara korupsi, kemiskinan, dan perceraian di Indonesia. Hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya memahami bahwa masalah sosial dan ekonomi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Data menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperburuk kondisi sosial, seperti meningkatnya angka perceraian yang berujung pada kemiskinan, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, pendekatan terpadu yang mengatasi ketiga isu ini sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu sosial dan ekonomi. Dengan menyajikan data empiris mengenai dampak korupsi terhadap kemiskinan dan perceraian, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dan membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut. Variabel yang diteliti, seperti pengeluaran publik, tingkat korupsi, dan angka perceraian, memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor ini saling memengaruhi. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi model untuk studi-studi selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mendorong pertanyaan baru yang dapat diteliti lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas.

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan berharga, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Keterbatasan ini mencakup fokus yang terbatas pada data kuantitatif dan kurangnya analisis kualitatif yang mendalam mengenai pengalaman individu yang terkena dampak. Penelitian ini tidak mengeksplorasi faktor-faktor budaya dan sosial yang mungkin juga berkontribusi pada fenomena yang diteliti, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya komprehensif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta mempertimbangkan konteks budaya dan sosial sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hazmi, Raldin Alif. "The Moderating Role Of Economic Growth In The Association Between Corruption And Poverty In Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 1 (19 Februari 2024): 76–86. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.725>.
- Al Manaanu, Yusuf, Mulyono Jamal, Triono Nugroho, dan Roqi Muttaqi. "Analisis Historis Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan Zakat." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (13 Oktober 2023): 212–21. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i2.975>.
- Ali, Muhammad Nasihudin. "Kebijakan Umar Ibn Abdul Aziz Dalam Pemberantasan Korupsi." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 1, no. 2 (21 Oktober 2020): 37–45. <https://doi.org/10.34007/warisan.v1i2.305>.
- Arumingtyas, Lusia. "Klasemen Liga Korupsi Isu Lingkungan, Siapa Juaranya?" *Mongabay.co.id* (blog), 28 Mei 2025. <https://mongabay.co.id/2025/05/28/klasemen-liga-korupsi-isu-lingkungan-siapa-juaranya/>.
- Azwar, Azwar Azwar, dan Rahmaluddin Saragih. "Does Corruption Affect Poverty in Indonesia?" *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 11, no. 1 (20 Agustus 2018): 1–14. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.175>.
- Chetwynd, Eric, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector. "Corruption and poverty: A review of recent literature." *Management Systems International* 600 (2003): 5–16.
- Gupta, Sanjeev. "Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?" *IMF Working Papers* 1998, no. 076 (Mei 1998): 1. <https://doi.org/10.5089/9781451849844.001>.

Harahap, Kuliman. "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz." *Jurnal Ipteks Terapan* 8, no. 2 (14 Oktober 2016): 58–69. <https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i2.424>.

Hayati, Siti. "Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah." *Millah: Journal of Religious Studies*, 2019, 99–116. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art5>.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024 - Tabel Statistik." Diakses 6 Juni 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2024>.

Kaloko, Istiqomah. "Suami Tak Mau Bayar Pinjaman hingga Akhirnya Cerai,Wanita Ini Harus Jual Perhiasan untuk Melunasi," 1748960683. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/suami-tak-mau-bayar-pinjaman-hingga-akhirnya-ceraiwanita-ini-harus-jual-perhiasan-untuk-melunasi/ar-AA1G0CD0?ocid=BingNewsVerp>.

Kusumastuti, Annisa Silvi, dan Mohammad Ghozali. "Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdil Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah." *ASAS* 12, no. 01 (27 Juli 2020): 1–18. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6920>.

Kusumastuti, Annisa Silvi, dan Ardhian Ahmad Syakuro. "Peran Kebijakan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia." *ZISWAF ASFA JOURNAL* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 106–16. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.1>.

Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, dan Siti Hayati. "The Impact of Caliph Umar Ibn Abdul Aziz's Economic Policy on the Welfare of the Daula Umawiyah Community." *Millah* 19, no. 1 (Agustus 2019): 99–116. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art5>.

"Menag: Perceraian Lahirkan Orang Miskin Baru." Diakses 6 Juni 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/23/12490721/menag-perceraian-lahirkan-orang-miskin-baru>.

- Ndikumana, Leonce. "Corruption and Pro-Poor Growth Outcomes: Evidence and Lessons for African Countries." Working paper. Working Papers. Political Economy Research Institute, University of Massachusetts at Amherst, 2006. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:uma:periwp:wp120>.
- Negin, Vahideh, Zakariah Abd Rashid, dan Hesam Nikopour. "The Causal Relationship between Corruption and Poverty: A Panel Data Analysis." MPRA Paper, 25 Juni 2010. <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/24871/>.
- Ng, A. H., Abdul Ghani Farinda, Fock Kui Kan, Ai Ling Lim, dan Teo Ming Ting. "Poverty: Its causes and solutions." *International Journal of Humanities and Social Sciences* 7, no. 8 (2013): 2471-79.
- Ningrum, Nurani Puspa, dan Yuliawati. "Terobosan Dan Perubahan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 8, no. 1 (3 April 2020): 1-27.
- Rahayu, Dewi. "Natural Resources, Human Capital and Economic Growth: Evidence from Indonesia." Dalam *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia*. Magelang, Indonesia: EAI, 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311792>.
- Rahayu, Ina Purwantini, dan Tri Widodo. "The Causal Relationship Between Corruption and Poverty in Asean: A General Method of Moments/Dynamic Panel Data Analysis." *Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura* 15, no. 3 (1 Desember 2013): 527. <https://doi.org/10.14414/jebav.v15i3.119>.
- Rose-Ackerman, Susan. "Corruption and Development." Dalam *International Development Governance*, disunting oleh Ahmed Shafiqul Huque dan Habib Zafarullah, 1 ed., 289-303. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315092577-16>.

Tadjoeddin, Mohammad Zulfan. "A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development," 2007. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c05ed915d3cfd001100/wp35.pdf>.

Tempo. "Mahfud Md Bilang Kalau SDA Tidak Dikorupsi, Orang Indonesia Akan Dapat Rp20 Juta Tiap Bulan | tempo.co," Desember | 21.18 WIB 2023. <https://www.tempo.co/politik/mahfud-md-bilang-kalau-sda-tidak-dikorupsi-orang-indonesia-akan-dapat-rp20-juta-tiap-bulan-111757>.

Ulhaq, Muhammad Zia. "Pengelolaan Keuangan Republik Islam (Umar Bin Abdul Aziz)." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (21 Juni 2020). <https://doi.org/10.33477/eksy.v2i01.1330>.

Wihayati, Anisa. "Peran Kepribadian dalam Kesuksesan Pembangunan: Studi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz." *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 6, no. 1 (16 Juli 2024): 67-86. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v6i1.306>.

Zetrina Alya, dan Sebastian Herman. "How Omar bin Abdul Aziz Reached Economic Golden Era: Unearthing the Umayyad History From Economics Perspective." *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 2 (11 September 2023). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.5712>.